



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

SUBBAGIAN HUMAS

Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

Keseriusan Pansus RSSW Disoal

Dikhawatirkan Senasib dengan Pansus Angket

SEJUMLAH pihak mengawatirkan keberadaan Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) berpotensi 'masuk angin' dan tak memberikan hasil yang jelas.

Hal itu didasari pengalaman sebelumnya, yakni Pansus Tim Angket DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Ketika itu Tim Angket DPRD DKI Jakarta mencari pelanggaran konstitusi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), namun berakhir tanpa hasil yang jelas.

"Kekhawatiran pansus laporan BPK akan

berakhir tanpa hasil sangat beralasan, jika melihat kinerja pansus yang hanya galak di awal dan melemah menjelang akhir," ujar Ketua Lembaga Pemantau Jakarta (LPJ) Asep Setiawan kepada INDOPOS, kemarin (7/9).

Ia menilai, batalnya pansus melaporkan temuannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu indikasi ketidakseriusan Pansus LHP BPK, satu di antaranya menyoroti persoalan pembelian lahan milik RS Sumber Waras (RSSW) yang terindikasi terjadi kerugian daerah sebesar Rp 191 miliar.

Padahal sebelumnya pelaporan ke KPK sudah masuk dalam agenda resmi pansus. Agenda serupa seperti kunjungan pansus ke lokasi lahan RSSW dan bertemu dengan Direktur RSSW Abraham. "Jangan salahkan masyarakat kalau meragukan kinerja pan-

sus, karena kenyataannya pansus memang tidak konsisten," kata Asep.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana membantah tuduhan bahwa Pansus DPRD DKI yang dipimpinnya 'masuk angin' saat mengusut temuan BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Hingga kini, pansus masih bekerja. "Belum selesai, semua masih bekerja," tegas dia.

Triwisaksana berjanji, apabila tiba waktunya nanti, pansus akan menyampaikan laporan kerja ke publik melalui sidang paripurna. Sayangnya, belum bisa dipastikan jadwal pengumuman hasil pansus ke publik. "Belum tau kapan paripurnanya, tergantung pimpinan dewan kan," tutur dia.

Seperti diketahui, BPK merekomendasikan agar Gubernur Ahok membatalkan

pembelian lahan seluas 36.410 meter persegi dari RSSW. Sebab terindikasi kerugian minimal Rp 191,33 miliar. Permintaan tersebut dituangkan dalam laporan audit BPK atas APBD tahun 2014. Jika pembelian tersebut tak dibatalkan, BPK meminta Ahok melakukan tiga hal.

Yakni pertama, memulihkan indikasi kerugian minimal senilai Rp 191.334.500.000. Kerugian ini adalah selisih dengan harga tanah milik pihak lain. Jika pembelian tak dibatalkan, Ahok juga merekomendasikan meminta pertanggungjawaban Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) agar menyerahkan lokasi fisik tanah di Jalan Kyai Tapa. Lokasi ini sesuai yang ditawarkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bukan lokasi di Jalan Tomang Utara. (wok)